



REPUBLIK INDONESIA

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
KEMENTERIAN PARIWISATA, PERDAGANGAN DAN INDUSTRI
REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR-LESTE
TENTANG
KERJA SAMA TEKNIK DI SEKTOR PERDAGANGAN

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan Kementerian Pariwisata, Perdagangan dan Industri Republik Demokratik Timor-Leste, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak",

BERKEINGINAN untuk memperkuat kerja sama teknik dan hubungan persahabatan yang telah terjalin di antara Para Pihak;

MERUJUK pada *Joint Communiqué concerning Diplomatic Relations* antara Republik Indonesia dan Republik Timor-Leste yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 2 Juli 2002;

MEMPERTIMBANGKAN pentingnya kerja sama untuk mempromosikan pengembangan sektor perdagangan guna meningkatkan kondisi ekonomi dan sosial Para Pihak atas dasar persamaan, saling menghormati dan mendapatkan manfaat;

SESUAI DENGAN hukum dan peraturan yang berlaku di masing-masing negara;

TELAH MENCAPAI kesepakatan sebagai berikut:

PASAL I

TUJUAN

Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mendorong kerja sama teknik di antara Para Pihak, khususnya pada peningkatan kapasitas para pelaku usaha dan aparatur di Kementerian Pariwisata, Perdagangan dan Industri Republik Demokratik Timor-Leste di sektor perdagangan.

PASAL II

LINGKUP KERJA SAMA

1. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia akan membantu Kementerian Pariwisata, Perdagangan dan Industri Republik Demokratik Timor-Leste di sektor perdagangan sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan kapasitas dan memperkuat institusi serta mengadakan pelatihan program khusus di seluruh sektor perdagangan;
 - b. Melakukan konsultasi untuk menentukan kebijakan perdagangan dan menyediakan kesempatan pelatihan bagi para pelaku usaha dan aparatur di Kementerian Pariwisata, Perdagangan dan Industri Republik Demokratik Timor Leste pada bidang-bidang yang disetujui oleh Para Pihak;
 - c. Mendukung implementasi kerangka pengembangan perdagangan global;
 - d. Partisipasi bersama, interaksi, dan fasilitasi terkait pertukaran produk-produk nasional dan pemasaran secara bilateral dan acara-acara pameran internasional; dan
 - e. mendesain dan mengajukan kerangka program aksi oleh *Joint Technical Working Group*.
2. Para Pihak akan menyelenggarakan pertemuan tahunan untuk mengimplementasikan dan mengidentifikasi program-program pada tahun berikutnya dan mengevaluasi program-program yang sedang berjalan.

PASAL III

IMPLEMENTASI PROGRAM

1. Seluruh kontribusi keuangan untuk mendukung implementasi setiap program akan dikoordinasikan, dinegosiasikan dan diimplementasikan melalui pengaturan khusus yang akan menghormati kepentingan masing-masing pihak.
2. Dalam hal mendiskusikan pengaturan khusus, Para Pihak wajib memperhitungkan ketersediaan dana untuk mendukung implementasi program sebelum dan selama implementasi program.

PASAL IV

AMANDEMEN

1. Kesepakatan Bersama ini dapat diamandemen dengan persetujuan tertulis Para Pihak.
2. Setiap amandemen terhadap Kesepakatan Bersama ini merupakan satu bagian dan tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PASAL V

PENYELESAIAN SENGKETA

Setiap perselisihan yang timbul dari interpretasi atas Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi antara Para Pihak.

PASAL VI

KERJA SAMA DI MASA DATANG

1. Kesepakatan Bersama ini mengatur hal-hal umum dan pengaturan kerja sama di masa datang antara Para Pihak.

2. Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat tetap atas kerja sama di masa datang ini akan ditetapkan kemudian, apabila keadaan memungkinkan.

PASAL VII

JANGKA WAKTU, PENGAKHIRAN DAN KEBERLAKUAN

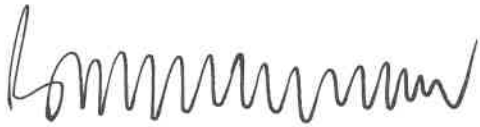
1. Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan dan akan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
2. Para Pihak dapat memperbarui Kesepakatan Bersama ini untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan permohonan pembaruan disampaikan secara tertulis selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum pembaruan Kesepakatan Bersama hendak diberlakukan.
3. Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri oleh salah satu pihak melalui pemberitahuan tertulis yang disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dimaksudkan.
4. Pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak mempengaruhi keberlakuan dan jangka waktu program-program yang sedang berjalan dan proyek-proyek yang disusun berdasarkan Kesepakatan Bersama ini hingga program-program dan proyek-proyek tersebut selesai dilaksanakan kecuali Para Pihak menyepakati sebaliknya.

DENGAN DEMIKIAN, yang bertandatangan di bawah ini, Para Pihak yang berwenang secara sah oleh masing-masing pemerintah telah menandatangani Kesepakatan Bersama ini.

Dibuat dalam rangkap dua di Bogor pada 19 Juli 2022 dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Portugis, dan Bahasa Inggris. Seluruh teks mempunyai kekuatan hukum yang sama. Apabila terjadi perbedaan interpretasi, teks Bahasa Inggris yang akan berlaku.

UNTUK DAN ATAS NAMA
KEMENTERIAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

UNTUK DAN ATAS NAMA
KEMENTERIAN PARIWISATA,
PERDAGANGAN DAN INDUSTRI
REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR-LESTE



Dr. (H.C.), ZULKIFLI HASAN, S.E., M.M.

MENTERI PERDAGANGAN



JOSÉ LUCAS DO CARMO DA SILVA, PhD

MENTERI PARIWISATA, PERDAGANGAN
DAN INDUSTRI



REPUBLIK INDONESIA

**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
THE MINISTRY OF TRADE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE MINISTRY OF TOURISM, COMMERCE AND INDUSTRY OF
THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF TIMOR-LESTE
ON
TECHNICAL COOPERATION ON TRADE SECTOR**

The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia and the Ministry of Tourism, Commerce and Industry of the Democratic Republic of Timor-Leste hereinafter collectively referred to as "The Parties";

DESIRING to strengthen technical cooperation and friendly relations existing between the Parties;

REFERRING to the Joint Communiqué Concerning Diplomatic Relations between the Republic of Indonesia and the Democratic Republic of Timor-Leste signed in Jakarta, on the 2nd July 2002;

CONSIDERING the importance of cooperation to promote development of trade sector in order to improve the economic and social condition of the Parties on the basis of equality, mutual respect and benefit;

PURSUANT to the prevailing laws and regulations in their respective countries;

HAVE REACHED an understanding as follows:

ARTICLE I

PURPOSE

The purpose of this Memorandum of Understanding is to promote technical cooperation between the Parties especially on capacity building for the entrepreneurs and officials of the Ministry of Tourism, Commerce and Industry of the Democratic Republic of Timor-Leste on trade related areas.

ARTICLE II

SCOPE OF COOPERATION

1. The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia will assist the Ministry of Tourism, Commerce and Industry of the Democratic Republic of Timor-Leste on trade related areas, namely as follows:
 - a. improving capacity and institutional strengthening and hold a specific training programs in all trade related areas;
 - b. consultancy to define trade policies and providing training opportunities for the Ministry of Tourism, Commerce and Industry of the Democratic Republic of Timor-Leste's entrepreneurs and government officials in selected areas agreed by the Parties;
 - c. support of the implementation of global trade development framework;
 - d. joint participation, interaction and facilitation on exchange of national products and marketing in bilateral and international promotional events; and
 - e. design and propose the action programs framework by Joint Technical Working Group.
2. The Parties will organize annual meeting to implement and identify the programs for the following years and evaluate on-going programs.

ARTICLE III
PROGRAM IMPLEMENTATION

1. All financial contribution to support implementation of each program shall be coordinated, negotiated, and implemented through the development of specific arrangement which will respect the mutual interest of each Party.
2. When discussing the specific arrangement, the Parties shall take into account the availability of funds to support programs implementation prior to and during each program implementation.

ARTICLE IV
AMENDMENTS

1. This Memorandum of Understanding may be amended by mutual written agreement of the Parties.
2. Any amendment shall form an integral part of this Memorandum of Understanding.

ARTICLE V
DISPUTE SETTLEMENT

Any dispute arising out of the interpretation of this Memorandum of Understanding shall be settled amicably by consultation between the Parties.

ARTICLE VI
FUTURE COOPERATION

1. This Memorandum of Understanding describes the general conditions and arrangements for the future cooperation between the Parties.
2. The exact terms and conditions of this future cooperation will be established in due course, should circumstances permit.

ARTICLE VII
DURATION, TERMINATION AND ENTRY INTO FORCE

1. This Memorandum of Understanding shall enter into force on the date of its signature and will be valid for a period of 3 (three) years.
2. The Parties may renew the Memorandum of Understanding for a period of 3 (three) years in which the request of such renewal shall be communicated in writing 6 (six) months prior to effect of the Memorandum of Understanding.
3. This Memorandum of Understanding may be terminated by either Party through written notice which shall be submitted 3 (three) months prior to the intended date of termination.
4. The termination of this Memorandum of Understanding shall not affect the validity and duration of any ongoing programs and projects made under this Memorandum of Understanding until completion of such programs and projects unless the Parties decide otherwise.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, duly authorized thereto by their respective Governments have signed this Memorandum of Understanding.

Done in Duplicate in Bogor on 19th of July 2022 in Indonesian, Portuguese and English languages. All texts are equally authentic. In case of divergent interpretation, the English text shall prevail.

FOR AND ON BEHALF OF THE
MINISTRY OF TRADE OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA

FOR AND ON BEHALF OF THE MINISTRY
OF TOURISM, COMMERCE AND
INDUSTRY OF THE DEMOCRATIC
REPUBLIC OF TIMOR-LESTE



Dr. (H.C.) ZULKIFLI HASAN, S.E., M.M.

MINISTER OF TRADE



JOSÉ LUCAS DO CARMO DA SILVA, PhD

MINISTER OF TOURISM, COMMERCE
AND INDUSTRY



REPUBLIK INDONESIA

**MEMORANDO DE ENTENDIMENTO
ENTRE
O MINISTÉRIO DO TURISMO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
E
O MINISTÉRIO DO COMÉRCIO DA REPÚBLICA DA INDONÉSIA
SOBRE
COOPERAÇÃO TÉCNICA NO SETOR DO COMÉRCIO**

O Ministério do Turismo, Comércio e Indústria da República Democrática de Timor-Leste e o Ministério do Comércio da República da Indonésia, adiante designados por "Partes",

DESEJANDO fortalecer a cooperação técnica e as relações amistosas existentes entre as Partes;

CONSIDERANDO o Comunicado Conjunto sobre Relações Diplomáticas entre a República Democrática de Timor-Leste e a República da Indonésia, assinado em Jacarta a 2 de julho de 2002;

DE ACORDO com as leis e regulamentos vigentes nos seus respectivos países;

CHEGARAM a um acordo como segue:

ARTIGO 1

OBJETIVO

O objetivo deste Memorando de Entendimento é promover a cooperação técnica especialmente no que concerne à capacitação de empresários e funcionários do Ministério do Turismo, Comércio e Indústria da República Democrática de Timor-Leste sobre áreas relacionadas com o comércio.

ARTIGO 2

ÂMBITO DE COOPERAÇÃO

O Ministério do Comércio da República da Indonésia prestará assistência ao Ministério do Turismo, Comércio e Indústria da República Democrática de Timor-Leste em áreas relacionadas com o comércio, designadamente através de:

- a. melhoria da capacidade e reforço institucional através de programas de formação específicos em todas as áreas relacionadas com o comércio;
 - b. consulta para definição de políticas sobre comércio e oportunidades de formação para os empresários e funcionários do Ministério do Turismo, Comércio e Indústria da República Democrática de Timor-Leste;
 - c. assistência à implementação do quadro de desenvolvimento do comércio global;
 - d. participação conjunta, interação, e facilitação da troca e comercialização de produtos nacionais em eventos promocionais bilaterais e regionais; e
 - e. elaboração e proposta do quadro de programas de ação pelo Grupo de Trabalho Técnico Conjunto.
2. As Partes organizarão uma reunião anual para implementar e identificar os programas para os anos seguintes e avaliar os programas em andamento.

ARTIGO 3

PROGRAMAS DE IMPLEMENTAÇÃO

1. Todas as contribuições financeiras de apoio à implementação de cada programa serão coordenadas, negociadas e implementadas através do desenvolvimento de acordos específicos que respeitarão os interesses de cada Parte.
2. Aquando da discussão de cada acordo específico, as Partes terão em consideração a disponibilidade de fundos para o apoio aos programas de implementação antes e durante a implementação de cada programa.

ARTIGO 4

ALTERAÇÕES

1. Este Memorando de Entendimento poderá ser alterado mediante acordo mútuo por escrito entre as Partes.
2. Qualquer alteração constituirá integrante deste Memorando de Entendimento.

ARTIGO 5

RESOLUÇÃO DE DISPUTAS

Qualquer disputa decorrente da interpretação ou implementação deste Memorando de Entendimento deverá ser resolvida amigavelmente por meio de consulta entre as Partes.

ARTIGO 6

COOPERAÇÃO FUTURA

1. Este Memorando de Entendimento estabelece as condições gerais do acordo para cooperação entre as Partes.

2. Os termos e condições exatos desta futura cooperação serão estabelecidos em tempo oportuno, quando as condições o permitam.

ARTIGO 7

DURAÇÃO, CESSAÇÃO E ENTRADA EM VIGOR

1. Este Memorando de Entendimento entrará em vigor na data da sua assinatura e terá a validade de 3 (três) anos.
2. As Partes poderão renovar este Memorando de Entendimento pelo um período de 3 (três) anos devendo o pedido de renovação ser comunicado por escrito com uma antecedência de 6 (seis) meses relativamente à cessação do Memorando de Entendimento.
3. Este Memorando de Entendimento poderá cessar por iniciativa de qualquer uma das Partes mediante comunicação por escrito que deverá ser submetido 3 (três) meses antes da data indicada para a sua cessação.
4. A cessação deste Memorando de Entendimento não afetará a validade e duração de quaisquer programas e projetos em andamento no âmbito deste Memorando de Entendimento até à conclusão de tais programas e projetos, a menos que as Partes decidam de outra forma.

EM TESTEMUNHO DE QUE, os abaixo assinados, devidamente autorizados pelos seus respectivos Governos, assinaram este Memorando de Entendimento.

FEITO em duplicado em Bogor, a 19 de Julho de 2022, em língua Indonésia, Português e Inglês. Todos os textos são igualmente autênticos. Em caso de divergência de interpretação, a versão em Inglês prevalecerá.

PELO MINISTÉRIO DO
COMÉRCIO DA REPÚBLICA DA
INDONÉSIA



ZULKIFLI HASAN
MINISTRO DO COMÉRCIO

PELO MINISTÉRIO DO TURISMO,
COMÉRCIO E INDÚSTRIA DA
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE
TIMOR-LESTE



JOSÉ LUCAS DO CARMO DA SILVA
MINISTRO DO TURISMO,
COMÉRCIO E INDÚSTRIA